PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)

TRYANISA RIZKI NASTASIA – 21112245

Pembimbing

Dr. Ely Suhayati, SE.,M.Sli.,Ak.,CA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2017
Email : tryanastasia@yahoo.co.id

ABSTRACT

Keywords:

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta mewujudkan hukum yang sama bagi warga masyarakat, untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan baiaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri, dalam kemandirian, pemerintah berupa meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak (Nana Adriana Erwis, 2012).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan (Ida Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto, 2011:4).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2009:119).

Surat tagihan pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak (Ilyas dan Burton, 2008:47).

Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, Wajib Pajak tidak atau kurang bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN, Surat Tagihan Pajak tidak akan diterbitkan oleh KPP apabila wajib pajak taat aturan pajak,

Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila jumlah pajak yang diterima oleh Negara lebih sedikit dari yang seharusnya. Penerbitan Surat Tagihan Pajak hanya akan dilakukan oleh KPP apabila Wajib pajak tidak taat pajak (Siti Resmi, 2009:59).

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo:147)

Penerimaana pajak adalah Pajak Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea Perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas (Siti Kurnia Rahayu, 2010:45).

1.2 Identifikasi Masalah

1) Penagihan Pajak Masih Belum Optimal
2) Ada wajib pajak yang sudah diberi surat teguran dua kali tidak menghiraukannya lalu KPP memberikan surat ketiga yaitu surat paksa setelah itu baru wajib pajak tersebut bersedia membayar utang pajaknya.
3) Penerimaan Pajak masih belum optimal karena mengalami penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Soreang
2) Seberapa besar pengaruh Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Soreang

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterrangan dan informasi mengenai pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Soreang
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak di KPP Pratama Soreang

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang khusunya mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.

2) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak lain terutama untuk mengetahui lebih jauh tentang Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis.

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti sesuai dengan topik yang terkait tentang Pengaruh Penagihan Pajak Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.

2) Bagi Prodi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik yang terkait serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan Akuntansi, Akuntansi Perpajakan dan ilmu lainnya yang terkait.

3) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menciptakan ide-ide penelitian baru

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Pengertian Pajak menurut Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Erly Suandy (2011:9)

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dpat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dlam hal yang individual,maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

2.1.2 Penagihan pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2009:125) adalah sebagai berikut **"**Penagihan pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melporkan, sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Adapun pengertian penagihan pajak menurut Moeljohadi (2006:174) adalah sebagai berikut :

Penagihan pajak adalah suatu serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.2.1 Dasar-dasar Penagihan pajak

Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut.

1. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

2.1.2.2 Tindakan penagihan pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.

1. Penagihan pasif Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak denghan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo.
2. Penagihan aktif Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan.

2.1.2.3 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak sebagai berikut:

Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP)

"Surat Tagihan Pajak diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda".

2.1.3 Surat Paksa

Menurut Siti Resmi (2014:57) Surat Paksa adalah :

"Salah satu sarana penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetaan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetaan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan".

2.1.3.1 Penerbitan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2013:147) surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,
2. Terhadap penaggung pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.1.3.2 Indikator Surat Paksa

Menurut Djoko Muljono (2010:160) indikator Surat Paksa adalah :

"Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan peringatan atau surat lain yang sejenis".

2.1.4 Penerimaan Pajak

Menurut Simanjuntak Timbuk dan Mukhlis imam (2012:30) menyatakan bahwa:

"Penerimaan pajak adalah salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Menurut Eddi Wahyudi (2009:68) menyatakan bahwa:

"Penerimaan pajak adalah dampak akumulasi agregatekonomi yang tercemin dari aktifitas bisnis, meskipun faktuasinya tidak secara jelas".

2.1.4.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak adalah :

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-Undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interprestasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonimi.

3. Sistem administrasi perpajakn yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dakam upaya optimalisasi penerimaan pajak
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualiatas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan kepuasan yang adil".

2.1.4.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari (John Hutagol, 2007:145) yang menyatakan bahwa :

"Dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak yang diperoleh".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh antara Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungakan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2011:139 bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut :

"Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara".

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Dini Aristina, 2015) menyatakan bahwa :

"Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

2.2.2 Pengaruh antara Surat paksa terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2009:121) sebagai berikut:

"Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Dina Anggraeni, 2015) menyatakan bahwa :

"Surat Paksa berpengaruh pada terhadap penerimaan pajak. meskipun masih ada sebagian kecil dari wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak theur. Proses penagihan pajak dengan kekuatan di kantor pajak pratama pekanbaru Senapelan masih mengalami banyak kendala".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai buktu melalui data yang terkumpul dan harus di uji secara empiris sehingga penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H_1 :Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:3) mengenai metode penelitian adalah sebagai Berikut :

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Menurut Sugiyono (2011:147) menyatakan bahwa :

"Metode Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) dalam Umi Narimawati menyatakan bahwa :

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan pajak yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas objek yang diteliti.

3.2 Oprasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002) dalam Umi Nariwati (2010:31) adalah sebagai berikut :

"Operasional Variable adalah proses penguraian variable penelitian kepada sub variable, dimensi, indikator sub variable, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasional dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variable sudah jelas konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Hipotesis yang akan diuji melalui variable-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Variabel bebas atau Independent (X_1 dan X_2)
   Menurut Sugiyono (2010 : 39) menjelaskan bahwa :
   "Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait)".
   Adapun variable bebas dalam penelitian ini adalah penagihan pajak (Variable $X_{1)}$ dan surat paksa (Variable X_2). Skala pengukuran variable ini adalah skala rasio.
2. Variabel tidak bebas atau dependent (Y)
   Menurut Sugiyono (2010 : 40) variable tidak bebas didefinisikan sebagai berikut:
   Variabel terikat adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".
   Adapun dependent variable dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak (variable Y). Skala pengukuran variable ini adalah skala rasio.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data skunder.

Menurut Toni Wijaya (2013:19) menyatakan bahwa data sekunder adalah

"Data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai, Data sekunder mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan meskipun diolah lebih lanjut".

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data jumlah surat tagihan pajak, jumlah surat paksa dan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.3.2 Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, tentunya penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
   Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan.
2. Riset Internet (*Online Research*)
   Pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:15) pengertian dari populasi adalah sebagai berikut:
"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Berdasarkan definisi tersebut dan penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang meneliti suatu kelompok, organisasi, program dan suatu unit sosial dalam kurun waktu tertentu maka populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Umi Narimawati (2012:38), mengungkapkan bahwa pengertian sampel adalah sebagai berikut :
"Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian".

Untuk menentukan sampel yang akan diteliti terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Untuk teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh penulis yang sesuai dengan judul yang diteliti adalah *sampling* jenuh.

Menurut Sugiyono (2012:84) definisi *sampling* jenuh adalah:
"*Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Berdasarkan penarikan sample tersebut, diperoleh sampel (n) dari data *time series* bulanan selama periode Januari 2011 – Desember 2015, yaitu sebanyak 60 sampel (5 tahun x 12 bulan). Pemilihan data bulanan ini agar memenuhi dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah data laporan bulanan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti berupa data jumlah Surat Tagihan, Jumlah Surat Paksa dan jumlah Penerimaan Pajak tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Jalan Raya Cimaremen No.205, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan September 2016 sampai dengan Februari 2017.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan beberapa cara untuk memperoleh data suatu kesimpulan dari keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam menggumpulkan data dapat berupa:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
   Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di instansi yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data primer (data yang diambil langsung dari instansi).
2. Wawancara
   Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yaitu dengan bagian Pengolaha Data dan Infornasi dan Penagihan yang sehubungan dengan penelitian terkait masalah apa yang dicari.
3. Dokumentasi
   Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi bagian Pengolaha Data dan Infornasi dan Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang periode tahun 2011-2015 guna memperoleh data-data yang diperlukan.
4. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
   Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur-literatur, buku-buku mengenai teori permasalahan yang diteliti dan menggunakan media internet sebagai media pendukung dalam penelusuran informasi tambahan mengenai teori maupun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.6 Metode Pengujian Data

Didalam penggunaan analisis linear berganda, diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik regresi yang harus dipenuhi terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2011:163) tujuan uji normalitas adalah :

"Untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau tidak normal sama sekali".

Menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

a. "Jika probabilitas> 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
b. Jika probabilitas< 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal".

b. Uji Multikolinieritas

Menurut (Husein Umar, 2011:177) tujuan uji multikolinieritas adalah :

"untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen".

Menurut (Ghozali, 2011:105) tujuan uji multikolinieritas adalah:

"Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, jika independen saling berkorelasi , maka variabel-variabel ini tidak orgonal. variabel orgonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol".

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2011:139) tujuan uji heteroskedastisitas adalah :

"Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut hetoroskedastisitas".

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Menurut (Husein Umar, 2011:182) tujuan uji autokorelasi adalah:

"Untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian".

Untuk data *cross section*, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Jika ya, telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikan menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai *Durbin Watson* yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilain statistik *Durbin-Watson.*

Namun secara umum bisa diambil patokan:

1) Angka D-W di bawah - 2 berarti ada autokorelasi positif.
2) Angka D-W di antara – 2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3) Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negative

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Albert Kurniawan, 2010:52) regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

"Analisis regresi linier berganda pengaruh antara lebih dari 2 variabel, dimana terdiri dari atau lebih variabel *independen*/bebas dari 1 variabel *dependent*/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan penggunaan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*)".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan P enagihan pajak dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak. Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel *dependent*, bila dua atau lebih variabel *independent* sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel *dependent* (Y) dan variabel *independent* (X_1 dan X_2), persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

3. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain itu untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

$$r = \frac{\mathrm{n}\,(\sum \mathrm{XiYi}) - (\sum \mathrm{Xi} \sum \mathrm{y})}{\sqrt{\{n(\sum X1^2) - (\sum X1)^2\}\{n(\sum Y1^2) - (\sum Y1)^2\}}}$$

4. Analisis Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2011:98) tujuan koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut : "Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas".

$$Kd = (R)^2 \times 100\%$$

Sumber : (Umi Narimawati, 2007:89)

Keterangan :
Kd : Seberapa jauh perubahan variabel Y dipergunakan oleh variabel X
r^2 : Kuadrat Koefisien Korelasi

5. Uji Hipotesis

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari Penagihan Pajak dan Surat Paksa (variabel X) sebagai variabel bebas dengan Penerimaan Pajak (variabel Y) sebagai variabel terikat.

Langkah dalam analisis ini adalah menggunakan Uji Statistik t. Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian signifikasansi secara parsial). Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1) Hipotesis secara parsial (Uji Statistik t) antara variabel bebas Penagihan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.
   Ho $\beta_1 = 0$: Penagihan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
   H_a $\beta_1 \neq 0$: Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
2) Hipotesis secara parsial (Uji Statistik t) antara variabel bebas Surat Paksa terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.
   Ho : $\beta_i = 0$: Surat Paksa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
   H_a $\beta_1 \neq 0$: Surat Paksa secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

2. Menentukan tingkat signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

Menghitung nilai t_{hitung} dengan mengetahui apakah pengaruh variabel bebas signifikan atau tidak dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{b}{Se(b)}$$

Sumber : (Sugiyono, 2011:192)

3. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :

a. Hasil t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan kriteria :

1) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
2) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
3) t hitung; dicari dengan rumus perhitungan t hitung, dan
4) t tabel; dicari di dalam tabel distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut, α = 0,05 dan dk = (n-k-1) atau 10-2-1=7

4. Menentukan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dari hipotesis diatas dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikan = 0.05

Kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis Ho adalah sebagai berikut:

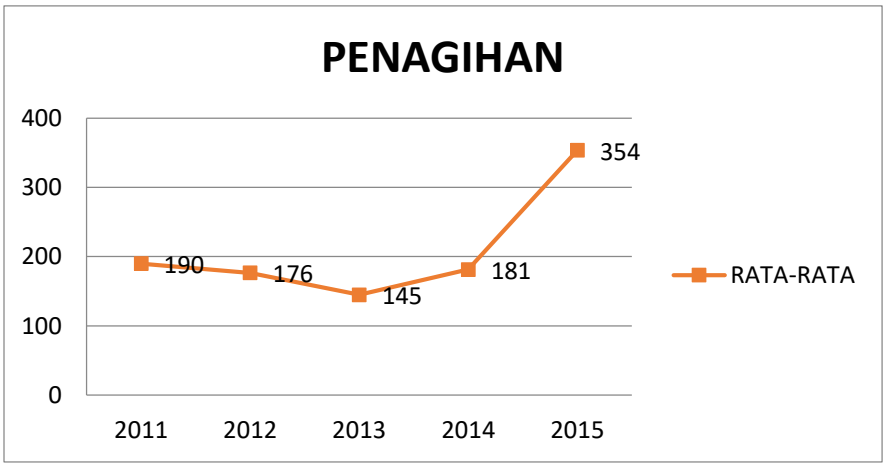
a. Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung}$, maka Ho ada pada daerah Penolakan, berarti H_1 diterima atau ada artinya Penagihan Pajak dan Surat Paksa berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
b. Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$, maka Ho ada pada daerah Penerimaan, berarti H_1 ditolak atau tidak ada artinya Penagihan Pajak Surat Paksa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

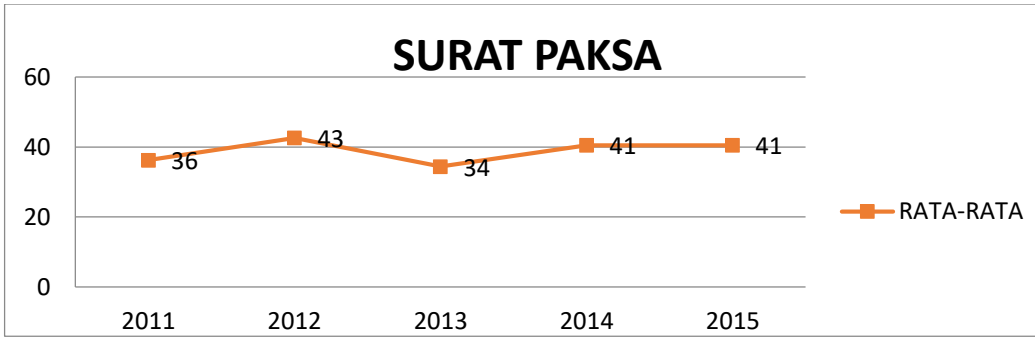
4.1.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Surat Ketetapan Pajak Periode Tahun 2011– 2015



Perkembangan Penagihan Pajak di KPP Soreang Pada Tahun 2011-2015

Terlihat dalam grafik diatas Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang mengalami kenaikan dan penurunan. Angka tertinggi pelaporan tercatat pada tahun 2015 sebesar 354, sedangkan untuk angka terendah Penagihan Pajak tercatat pada tahun 2013 sebesar 145.

4.1.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Surat Paksa Tahun 2011 – 2015



Perkembangan Surat Paksa Di KPP Soreang Pada Tahun 2011-2015

Terlihat dalam grafik diatas Surat Paksa pada KPP mengalami kenaikan dan penurunan. Angka tertinggi tercatat pada Tahun 2012 sebesar 43, sedangkan untuk angka terendah tercatat pada tahun 2013 sebesar 34.

4.1.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

Dari Data yang telah dihimpun, yaitu tentang penerimaan pajak di kpp Soreang terhitung meningkta karena dari tahun 2011 sampai 2015 jumlah total realisasi setiaptahun nya selalu mengalami peningkatan atau sesuai dengan target yang sudah di sepakati.

4.2 Analisis Verifikatif

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi. Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model-model regresi, variabel-variabel dependen, variabel-variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.

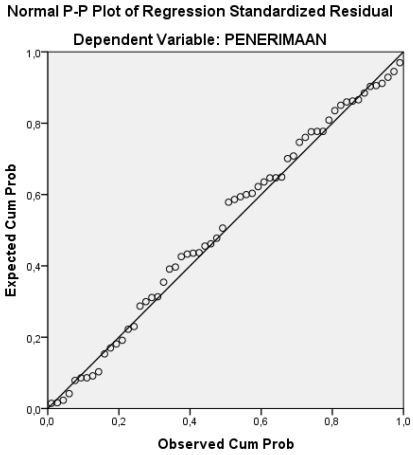
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas X

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,38870241
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,051
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		,618
Asymp. Sig. (2-tailed)		,839

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pada tabel dapat dilihat nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 839. maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada berikut:



Grafik Normalitas

Berdasarkan Normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual*, hasil di atas memberikan pernyataan bahwa tidak terdapat masalah pada uji normalitas, artinya berdasarkan grafik di atas menunjukan nilai sebaran data yang tercermin pada gambar dengan noktah yang menunjukan data berasal dari data distribusi normal, hal ini menunjukan bahwa persyaratan normal dapat dipenuhi dan dapat digunakan untuk pengujian statistik selanjutnya karena dimana dapat dilihat sebaran data berada disekitar garis diagonal. Grafik diatas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdisitribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model analisis jalur. Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dapat dilihat dari nilai *tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factors* (VIF) < 10 pada model regresi. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Hasil pengujian Asumsi Multikolinearitas

Coefficients[a]

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
,896	1,116
,896	1,116

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

Berdasarkan tabel 4.10 nilai tolerance untuk masing-masing variabel:

1. Nilai tolerance Penagihan Pajak, 0,896 > 0,10
2. Nilai tolerance Surat Paksa 0,896 > 0,10

Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas Penagihan Pajak dan Surat Paksa. nilai tolerance untuk masing-masing variabel:

1. Nilai VIF Penagihan Pajak, 1,116 > 0,10
2. Nilai VIF Surat Paksa 1,116> 0,10

Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas Penagihan Pajak dan Surat paksa, artinya bahwa di antara variabel bebas Penagihan

Pajak dan Surat Paksa tidak terdapat korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

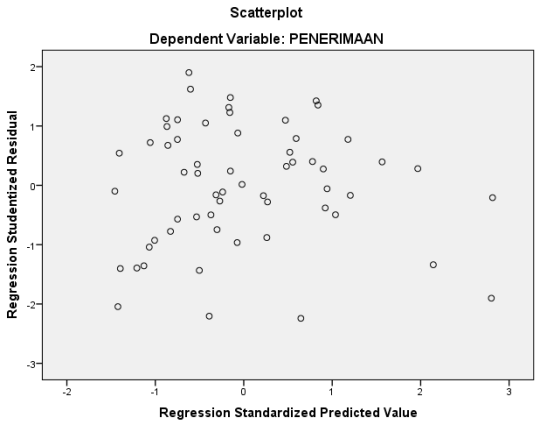
		PENAGIHAN	SURAT PAKSA	PENERIMAAN
PENAGIHAN	Pearson Correlation	1	,322*	,527**
	Sig. (2-tailed)		,012	,000
	N	60	60	60
SURAT PAKSA	Pearson Correlation	,322*	1	,454**
	Sig. (2-tailed)	,012		,000
	N	60	60	60
PENERIMAAN	Pearson Correlation	,527**	,454**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	60	60	60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel X_1 dan Y sebagai berikut:

1. Nilai *Correlation Coefficient* X_1 sebesar 0,527 > 0,05
2. Nilai *Correlation Coefficient* X_2 sebesar 0,454 > 0,05

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, artinya variabel pengganggu e (*error*) memiliki varian yang sama sepanjang observasi dari berbagai nilai dari variabel bebas, hal ini berarti data pada setiap variabel bebas memiliki rentangan yang sama.



Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokerelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan lainnya pada model regresi. Metode pengujian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Uji Durbin-Watson dan dengan menggunakan bantuan software SPSS.

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 1,566 sementara dari tabel d pada tingkat kekeliruan 5% untuk jumlah variabel bebas = 2 dan jumlah pengamatan n = 60 diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 1,514 dan batas atasnya (d_U) = 1,651. Karena nilai Durbin-Watson model regresi (1,566) berada diatas 1,623 maka ada keputusan yang dapat diisimpulkan tidak terdapat autokorelasi yang mempengaruhi keputusan pada model regresi.

4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Dari tabel dibawah dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

Y= 24.082 + 0.002 X1 + 0.010 X2

Dimana :
Y = Penerimaan pajak
X1 = Penagihan Pajak
X2 = Surat Paksa

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 24.082 menunjukkan nilai rata-rata penerimaan pajak di KPP Soreang selama periode tahun 2011-2015 selama 12 bulan, jika penagihan pajak, dan surat paksa sama dengan nol.
2. Penagihan pajak memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0.002, artinya setiap peningkatan penagihan pajak sebanyak 1 orang diprediksi akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0.002, dengan asumsi jumlah penagihan pajak tidak berubah.
3. Surat Paksa memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0.010, artinya setiap satu penambahan jumlah surat paksa yang diberikan diprediksi akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0.010, dengan asumsi Surat Paksa tidak berubah.

Hasil Estimasi Model Analisis Regresi Berganda Variabel X1 dan X2

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	24,082	,152		157,949	.000					
Penagihan Pajak	,002	,001	.425	3,817	.000	,527	,451	,402	,896	1.116
Surat Paksa	,010	,003	.317	2,852	.006	,454	,353	,300	,896	1.116

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

4.2.3 Analisi Korelasi Person

1. Korelasi Secara Parsial Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak

Hubungan antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0.527 dengan arah positif. Artinya Penagihan Pajak memiliki hubungan yang kuat dengan Penerimaan Pajak ketika tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Penagihan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak akan meningkat pula. Kemudian besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak ketika penerimaan pajak tetap adalah

$(0,527)^2 \times 100\% = 2.77\%$.

2. Korelasi Secara Parsial Surat Paksa dengan Penerimaan Pajak

Hubungan antara Surat Paksa dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,454 dengan arah positif. Artinya Surat Paksa memiliki hubungan yang tinggi dengan

penerimaa pajak. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Surat Paksa meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasila akan meningkat. Kemudian besar pengaruh Surat Paksa terhadap penerimaan pajak ketika penerimaan pajak tetap adalah $(0,454)^2$ x 100% = 20.7%.

4.2.4 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi Partial
Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
		Beta	Zero-order	
1	Penagihan	0,425	0,527	22,40%
	Surat Paksa	0,317	0,454	14,39%
Total Effect				36,79%

1. Variabel Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
   = 0,425 x 0,527 = 22,40%.
2. Variabel Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak
   = 0,317 x 0,454 = 14,39%.

Dari hasil perhitungan secara parsial di atas, dapat diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah variable X_1 X_2 terhadap Y yaitu sebesar 22,44% kemudia diikuti dengan Pengaruh X_2 terhadap Y yaitu sebesar 14,39%.

4.2.5 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh suatu variabel, yaitu pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.

Sebelumnya harus dicari terlebih dahulu nilai t_{tabel} karena akan dibandingkan dengan nilai t_{hitung}. T_{tabel} diperoleh dari tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α = 0,05, dimana tabel distribusi t dengan uji dua pihak .α/2= 0,05/2 = 0,025 dan db = n-k-1 = 60-2-1 = 45. Maka t adalah 3,817.

1. Pengaruh Penagihan Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,082	,152		157,949	,000
	PENAGIHAN	,002	,001	,425	3,817	,000
	SURAT PAKSA	,010	,003	,317	2,852	,006

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

Berdasarkan keluaran *software* SPSS seperti terlihat pada tabel diatas diperoleh nilai t_{hitung} variabel X_1 sebesar 3,817 dengan nilai signifikansi sebesar 000. Karena nilai t_{hitung} t_{tabe} 3,817 > 1,676 maka diputuskan untuk menerima H_1 sehingga H_0 ditolak. Jadi berdasarkan penelitian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

2. Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan keluaran *software* SPSS seperti terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai t_{hitung} variabel Surat Paksa sebesar 2,852 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006.

Karena nilai t_{hitung} 2,852 > t_{tabel} 1,676 maka diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_1 diterima. Jadi berdasarkan penelitian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Statistik SPSS Uji Parsial (Uji T)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,082	,152		157,949	,000
	PENAGIHAN	,002	,001	,425	3,817	,000
	SURAT PAKSA	,010	,003	,317	2,852	,006

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, besarnya pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah 0,085%. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis parsial menunjukan nilai t_{hitung} jatuh didaerah penolakan Ho (t_{hitung} 3, 817< t_{tabel} 1,676) dan tingkat signifikansinya lebih besar dari taraf nyata signifikansi yaitu 0,51 > 0,05 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H_1, artinya secara parsial Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak .

Teori yang menghubungakan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2011:139 bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut :

“Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara”.

Hasil penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiah M (2009) yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Maka dari itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang harus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak guna meningkatkan pengetahuan pajak pada masyarakat terutama untuk Wajib Pajak. Dengan adanya program sosialisasi diharapkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dapat meningkat.

4.2.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan, besarnya pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak adalah 14,39%. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis parsial menunjukan nilai t_{hitung} jatuh didaerah penolakan Ho (t_{hitung} 2,852< t_{tabel} 1,676) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H_1, artinya secara parsial Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan perhitungan dari tingkat signifikan dapat dilihat bahwa Surat Paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Teori yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2009:121) sebagai berikut:

"Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Hasil penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian yang Menurut Dina Anggraeni (2015) Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak

Hasil pengujian menunjukan bahwa adanya pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak, seperti yang dikatakan yaitu semakin sedikit jumlah Surat Paksa diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak sehingga jumlah penerimaan Pajak akan meningkat. Fenomena yang terjadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yaiutu Masih banyak wajib pajak yang sudah diberikan surat teguran karena belum juga melunasi utang pajak nya tetapi masih menghiraukan sehingga KPP memberikan surat paksa setelah itu baru wajib pajak bersedia membayar utang pajaknya (Bambang,2016).

Maka dari itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang harus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Penagihan Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Soreang mengalami pertumbuhan setiap bulannya, namun jumlah Penagihan Pajak tersebut cenderung fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya. Hal ini menyebabkan naik dan turun pula penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Soreang. Penagihan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
2. Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Soreang secara rata-rata mengalami kenaikan dan penurunan. Dari hasil tersebut membuat penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Soreang menjadi tidak konstan atau terkadang naik atau terkadang menurun penerimaannya. Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

5.2.1 Saran praktis

a. Saran Oprerasional

1. Kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Soreang bila memungkinkan lebih meningkatkan atau sebaiknya dilakukan penyuluhan ataupun sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan kewajiban perpajakan pada masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, diharapkan agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya melalui surat tagihan pajak yang diterbitkan sehingga Kantor Pelayanan Pajak juga semakin meningkat.
2. Kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Soreang agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya melalui surat paksa yang diterbitkan, selain itu untuk petugas perpajakan agar mensosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

b. Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti ekstensifikasi atau intensifikasi pajak.

Daftar Pustaka

Albert Kurniawan. 2010. Belajar mudah SPSS untuk pemula. Yogyakarta: Mediakom.
Djoko Mulyono. (2010*). Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak. 2011*: Ghalia Indonesia.

Ilyas, Wirawan dan Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mardiasmo . 2006, perpajakan , Edisi Revisi . Andi : Yogyakarta
Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009.* Yogyakarta: Penerbit Andi Ofsset.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yoryakarta : CV. Andi Offset.
Moeljadi, 2006, *Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, BPFE: Yogyakarta.

Pudyatmoko. 2009. *Pengantar hukum perpajakan.*
Singgih Santoso. 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Iman. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Soemarso S.R., 2009. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: ALFABETA.
Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Tony Wijaya. 2013*. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta, Graha Ilmu.
Undang-undang Tahun 2000 Tentang *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*.

Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan umum Tata Cara Perpajakan.*
Undang-undang No.16 Tahun 2000 Tentang *Ketentuan umum Tata Cara Perpajakan.*
Umi Narimawat. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah.* Bekasi: Ganesis.

Sumber dari jurnal

Dina Anggraeni. 2015. *Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Penerimaan Pajak* Di Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. JOM FISIP Volume 2 No. 2-Oktober 2015.

Dini Aristina. 2007. *Pengaruh Penagihan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Studi* pada Kantor Pelayanan Pajak Malang.

Nana Adriana Erwis. 2012*. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Zakiah M Syahab. 2008. *Pengaruh Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13, Agustus 2008.